



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

SIARAN PERS

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2012 Wajar Dengan Pengecualian

Kendari, 20 Mei 2013 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan agar kedepannya tidak terulang masalah yang sama. Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara BPK RI, Didi Budi Satrio ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012 kepada L. M. Rusman Emba selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 20 Mei 2013. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2012. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp4,40 milyar, diantaranya sebesar Rp1,41 milyar merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2004 sampai dengan TA 2011 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1,41 milyar tersebut sudah tidak memenuhi karakteristik kas sebagaimana diatur dalam Lampiran II Pernyataan Nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan perkiraan Aset Tetap per 31 Desember 2012 sebesar Rp3,70 triliun diantaranya diketahui terdapat 436 bidang tanah yang tidak memiliki nilai dan sebesar Rp61,78 milyar Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Instalasi yang tidak diketahui lokasinya. Selain itu, jumlah Aset Tetap sebesar Rp3,70 triliun tersebut juga termasuk permasalahan Aset Tetap tahun sebelumnya sebesar Rp23,06 milyar berupa Aset Tetap eks APBN yang tidak diketahui kejelasan dokumen penyerahannya dan Aset Tetap yang dimanfaatkan/dikuasai oleh non-SKPD tanpa perikatan yang jelas, yang belum dilakukan pemeriksaan dokumen/administrasi dan aspek legalitas dokumen penyerahannya (proses hibahnya) dari Pemerintah Pusat dan/atau status pinjam pakainya.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan perkiraan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 sebesar Rp116,81 milyar, diantaranya merupakan Peralatan dan Mesin sebesar Rp79,74 milyar yang dinyatakan hilang/tidak diketahui keberadaannya tanpa dukungan bukti-bukti yang memadai.

Ketiga kondisi tersebut tidak memungkinkan BPK RI untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan.

BPK RI berharap agar pemerintah daerah dan lembaga perwakilan dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Keterangan lebih lanjut:

Subbagian Hukum dan Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Telp: 0401 – 3129403 Fax: 0401 – 3129441
Email : hukmasbpkri_sultra@yahoo.co.id